



► PEMILIHAN UMUM

Kampanye Sumbang Indeks Kerawanan Pemilu

*Luqas Subarkah & Ujang Hasanudin
redaksi@harianjogja.com*

JOGJA—Kampanye dan hak pilih menjadi penyumbang tertinggi terhadap Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) DIY. Terjadinya kericuhan dan bentrokan antarsimpatisan dan pendukung parpol atau capres di DIY membuat skor IKP DIY berada di urutan kedua secara nasional di bawah Papua.

Komisiner Bawaslu DIY, Muh Amir Nasrudin, menjelaskan yang menyumbang skor tertinggi dalam IKP adalah dimensi kontestasi, terutama sub dimensi kampanye. Dan yang kedua adalah dimensi penyelenggaraan, terutama hak pilih. "Khususnya untuk DPTb [daftar pemilih tambahan] yang berpotensi menimbulkan kondisi darurat dalam pemilu," katanya dalam media gathering Bawaslu, Rabu (10/4).

Seperti diberitakan sebelumnya, Bawaslu merilis pemutakhiran IKP pada, Selasa (9/4). Dari hasil itu, Provinsi Papua tercatat menempati indeks tertinggi, yakni 55,08, dan DIY di posisi kedua, dengan indeks 52,67.

Bawaslu telah menyiapkan penyusunan TPS rawan dan patroli pengawasan. Penyusunan TPS rawan baru dapat didata setelah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menentukan di mana lokasi TPS, dan itu lima hari sebelum hari H. Sehingga mereka belum bisa mendata secara lengkap.

► Halaman 6

Kerawanan Pemilu di DIY

Indeks Kerawanan Pemilu di DIY tinggi bahkan berada pada nomor dua nasional. Salah satu kerawannya berada di tempat pemungutan suara (TPS).

Kota Jogja

Jumlah TPS	1.373 TPS
TPS rawan	39 TPS
TPS sangat rawan	4 TPS
TPS khusus	3 TPS

Kulonprogo

Jumlah TPS	1.258 TPS
TPS Rawaan	21 TPS

Lokasi Kecamatan Galur, Temori, Wates, Samigaluh, Kalibawang dan Girimulyo.

Faktor kerawanan karena geografis, sejarah konflik pemilu di masa lalu dan banyaknya jumlah caleg di satu kawasan.

DIY

Jumlah TPS	11.780 buah
TPS kurang rawan	11.679 TPS
TPS rawan	91 TPS
TPS sangat rawan	4 TPS
TPS khusus	6 TPS

Sleman

Jumlah TPS	3.391 TPS
TPS Aman	3.377 TPS
TPS Rawan	12 TPS
TPS khusus	Lapas Cebongan dan Pakem.

Ke-12 TPS kategori rawan tersebut berada di Babarsari, Depok. Hal tersebut dikarenakan daerah Babarsari banyak pendatang dengan latar belakang yang berbeda-beda.

Kabupaten Bantul

Jumlah TPS	3.039 TPS
TPS rawan	11 TPS

Gunungkidul

Jumlah TPS	2.718 TPS
Kurang rawan	2.710 TPS
Rawan	7 TPS
TPS khusus	1 TPS

Sumber: Bawaslu/Polda DIY

Kampanye Sumbang...

"Pemetaan kerawanan ini akan menjadi *guidens* bagi penyelenggara dan pengawas, titik mana yang perlu ekstra pengawasan dan upaya pencegahan sejak dini. Pemantau dan suka melawan juga bisa memilih akan berperan di mana berdasarkan pemetaan ini," katanya.

Indikator dari TPS rawan memiliki beberapa variable, di antaranya apakah ada TPS di dekat rumah sakit dan lembaga pendidikan seperti pesantren atau tidak, politik uang saat kampanye, terdapat penghasutan SARA di sekitar TPS, petugas KPPS berkampanye, TPS berada di dekat posko atau rumah tim kampanye, dan terdapat logistik yang rusak.

Patroli pengawasan dilakukan sejak masa tenang. Bawaslu juga akan menggunakan Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu), aplikasi berbasis android yang akan digunakan untuk mengawasi TPS mulai dari masa tenang sampai pada penghitungan suara.

Ketua Bawaslu DIY, Bagus Sarwono, mengaku telah menyiapkan 15.448 personel yang siap mengawasi pemilu, dengan rincian 12.479 pengawas pemilu, 2.417 sukarelawan, 589 pemantau pemilu.

Bawaslu DIY mencatat, sejauh ini setidaknya telah ada sebanyak 40 kasus pelanggaran pemilu di DIY, dengan rincian 26 merupakan temuan, dan 14 adalah laporan. 40 kasus itu terdiri dari 22 pelanggaran administrasi, 15 pidana dan tiga tidak masuk pelanggaran.

Ketua Divisi Penindakan Pelanggaran, Sri Rahayu Werdhiningsih, mengatakan dari 15 pelanggaran pidana, hanya dua yang ditangani dan telah diputus di pengadilan.

Intensifkan Pengawasan

Kapolres Sleman AKBP Rizky Ferdiansyah mengatakan polisi memiliki beberapa strategi untuk mengantisipasi potensi kerawanan pada pelaksanaan pemilu nanti. "Kami terapkan sistem rayon, misal jika kejadian di wilayah Polsek

Depok Barat, Polsek terdekat akan drop anggota, sambil menunggu dari Polres," jelas dia.

Ketua Bawaslu Sleman M Abdul Karim Mustofa

mengaku akan menggunakan rilis IKP yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI untuk mengintensifkan pengawasan mulai dari masa kampanye, masa tenang, hingga pemungutan dan penghitungan suara.

"Yang pertama terkait dengan variabel hak pilih, apakah pemilih yang masuk dalam DPK atau DPTb udah dipastikan memilih di TPS mana, yang nantinya tentu berkaitan dengan surat suara, ini kan harus diawasi, karena bisa jadi rawan," kata Abdul Karim.

Bawaslu Sleman juga akan mengawasi potensi politik uang pada masa kampanye hingga 13 April mendatang. "Selanjutnya terkait dengan netralitas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pemilu, harus klar," ujar dia.

Terakhir, kata dia, akan mengawasi pada saat pemungutan dan penghitungan suara agar berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. "Jadi teman-teman dari tingkat kecamatan, desa, hingga TPS akan terus berkoordinasi terkait dengan potensi-potensi kerawanan tersebut. Selain itu tentu juga kami berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait," kata dia.

Langkah serupa juga dilakukan Polres Gunungkidul. Kapolres Gunungkidul, AKBP Ahmad Fuady, mengatakan pola pengamanan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian yakni pola dua polisi mengawasi lima TPS dan 10 linmas; dua polisi mengawasi enam TPS dibantu 12 linmas; dua polisi mengawasi tujuh TPS dengan dibantu 14 linmas; dan dua polisi mengawasi delapan TPS dengan bantuan 16 linmas.

Ketua Bawaslu Kulonprogo, Ria Herlinawati menjelaskan di wilayahnya kerawanan yang

menonjol dan dijadikan laporan untuk variabel IKP adalah sengketa pemilu. "Karena di Kulonprogo pernah ada sengketa pemilu yang melibatkan lima parpol," jelas Ria.

Ia mengatakan setelah rilis terkait IKP, Bawaslu akan mengantisipasi kerawanan bekerja sama dengan *stakeholder* lainnya seperti kepolisian dan KPU Kulonprogo.

Kabag Ops Polres Kulonprogo, Kompol Sudarmawan mengatakan dalam mengantisipasi kerawanan pemilu, polisi memetakan kerawanan sampai pada tingkat TPS. Hasilnya, ada 21 TPS yang masuk kategori rawan. "Tiap-tiap TPS memiliki jenis kerawanan berbeda, ada yang rawan karena faktor geografis, sejarah konflik pemilu di masa lalu dan banyaknya jumlah caleg di satu kawasan itu," ujar Sudarmawan.

Bawaslu Bantul dan Polres Bantul mengintensifkan pertemuan dengan tokoh masyarakat, elite partai dan para ketua laskar agar mampu mengendalikan massa selama proses kampanye sampai penghitungan suara nanti. "Kami minta para tokoh mengendalikan masanya masing-masing supaya menjauhkan tindakan kekerasan," kata anggota Bawaslu Bantul Supardi.

Senada, Kapolres Bantul AKBP Sahat Marisi Hasibuan mengatakan sebenarnya dalam setiap izin penyelenggaraan kampanye yang masuk polisi meminta penyelenggara untuk membuat komitmen agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar.

Selain pengamanan selama proses kampanye, polisi juga sudah menyiapkan pengamanan di tiap TPS. Pola pengamanan akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan masing-masing TPS. Ada tiga kategori TPS, yakni aman, rawan, dan sangat rawan.

Namun Sahat enggan menjelaskan jumlah TPS tiap kategori tersebut termasuk TPS mana saja. (Fahmi Ahmad Burhan, Rahmat Jiwandono dan Yogi Anugrah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005